

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Kajian Umum Tentang Kenotariatan**

##### **2.1.1. Pengertian Notaris**

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “Notaries” itu berasal dari perkataan “nota literaria” berarti tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Notodisoerjo, soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, (Jakarta; Rajawali, 1982), hlm. 13

<sup>2</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Penerbit Balai Pustaka, cetakan ke-3, Jakarta

Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 10 Juli 1860. Yang sekarang dikenal dengan PJN, dalam kurun waktu itu PJN mengalami beberapa kali perubahan. dan saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>3</sup> .

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>4</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting

---

<sup>3</sup> Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasar kan undang-undang lainnya, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, **Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris**, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>5</sup> Dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UUJN<sup>6</sup>.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian,

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, **Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana**, (Semarang : CV. Agung,1991), hlm. 4

<sup>6</sup> Syarat tersebut antara lain : 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa; 3.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun); 4. sehat jasmani dan rohani; 5.berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; 7.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>7</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Lembaga Kenotariatan Indonesia**, (UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 16.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, **Etika Profesi Hukum**, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 34.

<sup>9</sup> Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (public). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

### **2.1.2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia.

Sejak berlakunya UUJN maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 3 UU No 2/2014 yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi Notaris

Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 UUJN Perubahan tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu.

Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. permintaan sendiri

---

adalah : a) warga negara Indonesia. b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUJN Perubahan dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib : a) menjalankan jabatannya dengan nyata b) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun

e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris ; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:<sup>12</sup>

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris;

Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

---

<sup>12</sup> Roni, **Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumater Barat**. (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010 ),hal 38.

### 2.1.3. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris.<sup>13</sup> Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*)<sup>14</sup> Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memegang jabatan Notaris . Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.<sup>15</sup>

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1))
- b. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1))
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54)

Kewajiban Notaris meliputi : <sup>16</sup>

- a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1))

---

<sup>13</sup> Mulyoto, **Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar** (Yogyakarta: CV, Cakrawala Media, 2010) , hlm 1

<sup>14</sup> Simon, **Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang**, (Tesis, Universitas Dipenogoro, Semarang 2011), hlm 16.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika**, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 177.

<sup>16</sup> Habib Adjie, **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm 91-92.



- b. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1))
- c. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a)
- d. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b)
- e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)
- f. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d)
- g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e)
- h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
- i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g)
- j. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h)
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i)

- l. Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j)
- m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l)
- o. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m)
- p. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n)
- q. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1))
- r. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1))

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 UUNJ  
Perubahan, yaitu :

- 1. Notaris dilarang :
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

#### **2.1.4. Kode Etik Profesi**

Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasari pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam melaksanakan profesinya. Hal-hal tersebut kemudian secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi. Kalangan Notaris membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Oleh sebab itu diperlukan kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris yang muncul dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri.

Pada dasarnya kode etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan juga untuk melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional di lain pihak.<sup>17</sup> Standar kode etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris.

---

<sup>17</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 170

Kode Etik Notaris memuat kewajiban serta larangan bagi Notaris yang sifatnya praktis. Terhadap pelanggaran kode etik terdapat sanksi-sanksi organisasi dan tanggung jawab secara moril terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Pasal 1 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode Etik Notaris ini berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya ikatan profesi bagi setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan Notaris di Indonesia yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. INI merupakan perkumpulan bagi para otaris yang telah memperoleh legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu INI merupakan Organisasi Notaris sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUJN beserta perubahannya.

Kode etik Notaris memuat kewajiban Notaris yang dapat dibagi menjadi:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 164.

<sup>19</sup>Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 166-168.

### 1. Kewajiban umum

- a. Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
- c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
- d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya; dan
- f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

### 2. Kewajiban Notaris terhadap klien

- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan;
- b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

### 3. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris

- a. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan;
  - b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.
4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri
- a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani;
  - b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Selain kode etik, Notaris sebagai suatu bentuk profesi mengharuskan dirinya untuk selalu bersikap secara profesional dalam bekerja. Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris harus memiliki perilaku profesional. Unsur-unsur perilaku professional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.

## **2.2. Kajian Tentang Penahanan**

### **2.2.1. Pengertian Penahanan**

Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengertian tentang Penahanan<sup>20</sup> Jadi apabila dilihat dari pengertian penahanan diatas dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>20</sup> Bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah sebagai berikut: Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

penahanan terhadap seseorang bisa dilakukan apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Andi Hamzah<sup>21</sup> berpendapat bahwa “penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan”. Dengan pendapat yang sama Lumintang<sup>22</sup> mengatakan bahwa “penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang”.

### 2.2.2. Syarat - Syarat Penahanan

Untuk bisa melakukan penahanan terhadap tersangka, maka harus terpenuhinya 2 syarat, yaitu syarat Subyektif,<sup>23</sup> dan Syarat obyektif.<sup>24</sup> Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa: “terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie*(pelanggaran terhadap Ordonansi Bea

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah,*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 19

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1996), hlm. 16.

<sup>23</sup> Syarat subyektif : Syarat Subyektif diatur di dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Syarat Subyektif tersebut hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak

<sup>24</sup> Syarat Obyektif : syarat obyektif tersebut dapat diuji ada atau tidak boleh orang lain.

dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

### **2.2.3. Lamanya Waktu penahanan**

Menurut Andi Hamzah<sup>25</sup> rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik (20 hari)
2. Perpanjangan oleh penuntut umum (40 hari)
3. Penahanan oleh penuntut umum (20 hari)
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (30 hari)
5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri (30 hari)
6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (60 hari)
7. Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi (30 hari)
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi (60 hari)
9. Penahanan oleh Mahkamah Agung (50 hari)
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung (60 hari)

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.134



#### **2.2.4. Bentuk – Bentuk Penahanan**

Penahanan di bedakan dengan beberapa bentuk penahanan yang diatur di dalam pasal 22 KUHAP sebagai berikut:

- a. Penahanan rumah tahanan negara, tersangka atau terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan).
- b. Penahanan rumah, dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan.

Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan.